

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 180 Tambahan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 227);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 572).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur coordinator penyelenggaraan pemerintahan di



wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran dana dari bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2019 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterahkan desa di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

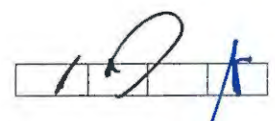
- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana; dan
- d. pengelolaan.

BAB II

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Jumlah dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2019 berjumlah Rp.1.418.873.454,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan



- b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh persen) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak masing-masing desa.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$\text{DBHPRD} = \text{AD} + \text{AF}$$

$$\text{AD} = \frac{\text{JDBHPRD} \times 60\%}{\text{D}}$$

$$\text{AF} = \text{RRPD} \times \text{JAF}$$

$$\text{RRPD} = (\text{RPD} / \text{TRPD Z1}) \times 100\%$$

Keterangan :

DBHPRD = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa.

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

JDBHPRD = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa

RRPD = Rasio Realisasi Pajak Desa

JAF = Jumlah Alokasi Formula (40% x DBHPRD)

RPD = Realisasi Pajak Desa

TRPD = Total Realiasi Pajak Desa se-Kabupaten Lamandau

D = Jumlah desa se-Kabupaten Lamandau

Pasal 6


Daftar penerima Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati berupa :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2019; dan
 - d. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT-PBB) Tahun 2018.
- (4) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan pelaksanaan inventarisasi aset desa sampai dengan tahun 2018 dan kepada Bupati Up. Kepala DPMD.



BAB IV
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 8

Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2019 digunakan untuk :

- a. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Kegiatan di bidang pembangunan;
- c. Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Kegiatan di bidang pembinaan masyarakat.

BAB V
PENGLOLAAN
Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2019

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019

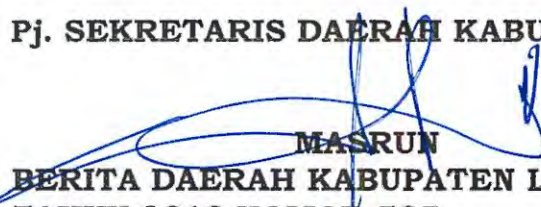
BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

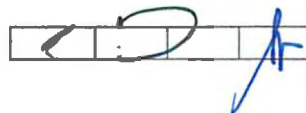

MASRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 585

KASUBAG	TGL DOKUMEN
PERATURAN PER-	16-4-2019
UNDANG-UNDANGAN	PARAF
	

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 08 TAHUN 2019
TANGGAL 28 Maret 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.**

**DAFTAR PENERIMA DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi Pajak		Alokasi Formula	Bobot * Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah per-Desa
				Realisasi Pajak	Rasio Realisasi Pajak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATANG KAWA	JAMUAT	10.015.577	3.944.958	0,001740	567.549.382	987.380	11.002.957
2	BATANG KAWA	GINIH	10.015.577	1.563.082	0,000689	567.549.382	391.223	10.406.800
3	BATANG KAWA	BENAKITAN	10.015.577	5.966.451	0,002631	567.549.382	1.493.338	11.508.915
4	BATANG KAWA	KINA	10.015.577	2.303.685	0,001016	567.549.382	576.587	10.592.164
5	BATANG KAWA	KARANG MAS	10.015.577	1.536.000	0,000677	567.549.382	384.444	10.400.021
6	BATANG KAWA	KINIPAN	10.015.577	4.340.000	0,001914	567.549.382	1.086.255	11.101.832
7	BATANG KAWA	LIKU	10.015.577	1.036.207	0,000457	567.549.382	259.351	10.274.928
8	BATANG KAWA	BATU TAMBUN	10.015.577	2.508.459	0,001106	567.549.382	627.840	10.643.417
9	BATANG KAWA	MENGKALANG	10.015.577	4.340.949	0,001914	567.549.382	1.086.493	11.102.070
10	BELANTIKAN RAYA	KARANG BESI	10.015.577	2.457.745	0,001084	567.549.382	615.147	10.630.724
11	BELANTIKAN RAYA	SUNGAI BULUH	10.015.577	42.628.018	0,018799	567.549.382	10.669.333	20.684.910
12	BELANTIKAN RAYA	BELIBI	10.015.577	16.691.084	0,007361	567.549.382	4.177.598	14.193.175
13	BELANTIKAN RAYA	BAYAT	10.015.577	47.244.627	0,020835	567.549.382	11.824.820	21.840.397
14	BELANTIKAN RAYA	BINTANG MANGALIH	10.015.577	1.893.042	0,000835	567.549.382	473.808	10.489.385
15	BELANTIKAN RAYA	NANGA MATU	10.015.577	1.892.345	0,000835	567.549.382	473.634	10.489.211



16	BELANTIKAN RAYA	TANGGA BATU	10.015.577	16.204.414	0,007146	567.549.382	4.055.790	14.071.367
17	BELANTIKAN RAYA	NANGA BELANTIKAN	10.015.577	15.006.052	0,006618	567.549.382	3.755.853	13.771.430
18	BELANTIKAN RAYA	BENUATAN	10.015.577	1.227.449	0,000541	567.549.382	307.217	10.322.794
19	BELANTIKAN RAYA	PETARIKAN	10.015.577	1.486.695	0,000656	567.549.382	372.104	10.387.681
20	BELANTIKAN RAYA	SUMBER CAHAYA	10.015.577	48.893.430	0,021562	567.549.382	12.237.498	22.253.075
21	BELANTIKAN RAYA	KAHINGAI	10.015.577	3.519.168	0,001552	567.549.382	880.810	10.896.387
22	BULIK	TAMIANG	10.015.577	94.440.240	0,041648	567.549.382	23.637.372	33.652.949
23	BULIK	NANGA PAMALONTIAN	10.015.577	10.046.155	0,004430	567.549.382	2.514.444	12.530.021
24	BULIK	SUNGAI MENTAWA	10.015.577	32.963.890	0,014537	567.549.382	8.250.506	18.266.083
25	BULIK	ARGA MULYA	10.015.577	52.582.833	0,023189	567.549.382	13.160.915	23.176.492
26	BULIK	PERIGI RAYA	10.015.577	24.339.244	0,010734	567.549.382	6.091.850	16.107.427
27	BULIK	KUJAN	10.015.577	144.731.607	0,063827	567.549.382	36.224.758	46.240.335
28	BULIK	BUKIT INDAH	10.015.577	32.352.097	0,014267	567.549.382	8.097.381	18.112.958
29	BULIK	GUCI	10.015.577	34.401.941	0,015171	567.549.382	8.610.434	18.626.011
30	BULIK	BATU KOTAM	10.015.577	42.492.075	0,018739	567.549.382	10.635.308	20.650.885
31	BULIK	BUMI AGUNG	10.015.577	41.109.605	0,018129	567.549.382	10.289.290	20.304.867
32	BULIK	BERUTA	10.015.577	25.645.328	0,011310	567.549.382	6.418.749	16.434.326
33	BULIK	BUNUT	10.015.577	37.580.980	0,016573	567.549.382	9.406.114	19.421.691
34	BULIK	SUMBER MULYA	10.015.577	8.111.782	0,003577	567.549.382	2.030.291	12.045.868
35	BULIK TIMUR	NANGA KEMUJAN	10.015.577	1.505.125	0,000664	567.549.382	376.717	10.392.294
36	BULIK TIMUR	TOKA	10.015.577	11.070.171	0,004882	567.549.382	2.770.744	12.786.321
37	BULIK TIMUR	MERAMBANG	10.015.577	6.792.891	0,002996	567.549.382	1.700.187	11.715.764
38	BULIK TIMUR	SUNGKUP	10.015.577	14.827.000	0,006539	567.549.382	3.711.038	13.726.615
39	BULIK TIMUR	NANGA PALIKODAN	10.015.577	1.967.500	0,000868	567.549.382	492.444	10.508.021
40	BULIK TIMUR	NUANGAN	10.015.577	-	-	567.549.382	-	10.015.577
41	BULIK TIMUR	NANGA KORING	10.015.577	11.046.394	0,004871	567.549.382	2.764.793	12.780.370
42	BULIK TIMUR	SUKA MAJU	10.015.577	26.442.645	0,011661	567.549.382	6.618.309	16.633.886
43	BULIK TIMUR	SEPONDAM	10.015.577	13.598.600	0,005997	567.549.382	3.403.583	13.419.160
44	BULIK TIMUR	PEDONGATAN	10.015.577	92.908.324	0,040973	567.549.382	23.253.950	33.269.527
45	BULIK TIMUR	BATU TUNGGAL	10.015.577	17.911.000	0,007899	567.549.382	4.482.930	14.498.507



46	BULIK TIMUR	BUKIT JAYA	10.015.577	24.801.062	0,010937	567.549.382	6.207.438	16.223.015
47	DELANG	RIAM TINGGI	10.015.577	2.170.978	0,000957	567.549.382	543.372	10.558.949
48	DELANG	RIAM PANAHAN	10.015.577	8.830.523	0,003894	567.549.382	2.210.185	12.225.762
49	DELANG	SEKOMBULAN	10.015.577	5.015.433	0,002212	567.549.382	1.255.309	11.270.886
50	DELANG	KUBUNG	10.015.577	1.896.098	0,000836	567.549.382	474.573	10.490.150
51	DELANG	LANDAU KANTU	10.015.577	2.096.805	0,000925	567.549.382	524.808	10.540.385
52	DELANG	PENYOMBAAN	10.015.577	5.800.925	0,002558	567.549.382	1.451.909	11.467.486
53	DELANG	LOPUS	10.015.577	20.000	0,000009	567.549.382	5.006	10.020.583
54	DELANG	HULU JOJABO	10.015.577	6.539.466	0,002884	567.549.382	1.636.758	11.652.335
55	DELANG	NYALANG	10.015.577	8.286.493	0,003654	567.549.382	2.074.020	12.089.597
56	DELANG	SEPOYU	10.015.577	3.884.195	0,001713	567.549.382	972.172	10.987.749
57	LAMANDAU	SEKOBAN	10.015.577	24.939.121	0,010998	567.549.382	6.241.993	16.257.570
58	LAMANDAU	TANJUNG BERINGIN	10.015.577	44.000	0,000019	567.549.382	11.013	10.026.590
59	LAMANDAU	SAMU JAYA	10.015.577	10.206.597	0,004501	567.549.382	2.554.601	12.570.178
60	LAMANDAU	CUHAI	10.015.577	2.808.998	0,001239	567.549.382	703.062	10.718.639
61	LAMANDAU	SUJA	10.015.577	24.546.117	0,010825	567.549.382	6.143.628	16.159.205
62	LAMANDAU	PENOPA	10.015.577	14.238.968	0,006279	567.549.382	3.563.860	13.579.437
63	LAMANDAU	KAWA	10.015.577	17.961.205	0,007921	567.549.382	4.495.496	14.511.073
64	LAMANDAU	KARANG TABA	10.015.577	700.000	0,000309	567.549.382	175.202	10.190.779
65	LAMANDAU	SUNGAI TUAT	10.015.577	11.869.582	0,005234	567.549.382	2.970.828	12.986.405
66	LAMANDAU	BAKONSU	10.015.577	47.845.775	0,021100	567.549.382	11.975.281	21.990.858
67	MENTHOBI RAYA	BUKIT HARUM	10.015.577	80.692.746	0,035585	567.549.382	20.196.523	30.212.100
68	MENTHOBI RAYA	BUKIT MAKMUR	10.015.577	73.617.825	0,032465	567.549.382	18.425.747	28.441.324
69	MENTHOBI RAYA	LUBUK HIJU	10.015.577	16.356.000	0,007213	567.549.382	4.093.730	14.109.307
70	MENTHOBI RAYA	SUMBER JAYA	10.015.577	69.756.335	0,030763	567.549.382	17.459.257	27.474.834
71	MENTHOBI RAYA	MUKTI MANUNGGAL	10.015.577	63.786.042	0,028130	567.549.382	15.964.958	25.980.535
72	MENTHOBI RAYA	BATU AMPAR	10.015.577	33.714.363	0,014868	567.549.382	8.438.341	18.453.918
73	MENTHOBI RAYA	BUKIT RAYA	10.015.577	63.335.210	0,027931	567.549.382	15.852.119	25.867.696
74	MENTHOBI RAYA	TOPALAN	10.015.577	42.679.875	0,018822	567.549.382	10.682.312	20.697.889
75	MENTHOBI RAYA	NANUAH	10.015.577	27.780.635	0,012251	567.549.382	6.953.193	16.968.770



76	MENTHOBI RAYA	MELATA	10.015.577	44.006.450	0,019407	567.549.382	11.014.339	21.029.916
77	MENTHOBI RAYA	MODANG MAS	10.015.577	60.805.444	0,026815	567.549.382	15.218.946	25.234.523
78	SEMATU JAYA	BATU HAMBawang	10.015.577	19.779.125	0,008723	567.549.382	4.950.501	14.966.078
79	SEMATU JAYA	PURWAREJA	10.015.577	78.632.555	0,034677	567.549.382	19.680.879	29.696.456
80	SEMATU JAYA	BINA BHAKTI	10.015.577	52.535.933	0,023168	567.549.382	13.149.177	23.164.754
81	SEMATU JAYA	RIMBA JAYA	10.015.577	32.541.839	0,014351	567.549.382	8.144.871	18.160.448
82	SEMATU JAYA	MEKAR MULYA	10.015.577	73.379.773	0,032360	567.549.382	18.366.165	28.381.742
83	SEMATU JAYA	JANGKAR PRIMA	10.015.577	57.460.259	0,025340	567.549.382	14.381.682	24.397.259
84	SEMATU JAYA	WONOREJO	10.015.577	63.698.384	0,028091	567.549.382	15.943.018	25.958.595
85	SEMATU JAYA	TRI TUNGGAL	10.015.577	82.961.956	0,036586	567.549.382	20.764.507	30.780.084
TOTAL			851.324.045	2.267.574.377	1,000000	48.241.697.470	567.549.409	1.418.873.454

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Maret 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

